

**MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*
DAN MANAJEMEN LABA MELALUI
MANIPULASI AKTIVITAS RIIL**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

WINDA ARYANI

NIM. C2C007132

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Winda Aryani
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007132
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*
DAN MANAJEMEN LABA MELALUI
MANIPULASI AKTIVITAS RIIL**

Dosen Pembimbing : Surya Raharja, S.E., M.Si., Akt

Semarang, 25 Mei 2011

Dosen Pembimbing,

(Surya Raharja, S.E., M.Si., Akt)

NIP. 19760525 200604 1002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Winda Aryani

Nomor Induk Mahasiswa : C2C007132

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*
DAN MANAJEMEN LABA MELALUI
MANIPULASI AKTIVITAS RIIL**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 15 Juni 2011

Tim Penguji :

1. Surya Raharja, S.E., M.Si., Akt. (.....)

2. Dr. Endang Kiswara, M.Si., Akt (.....)

3. Puji Harto, SE., M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Winda Aryani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Mekanisme *Corporate Governance* dan Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 25 Mei 2011

Yang membuat pernyataan,

(Winda Aryani)

NIM. C2C007132

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of the implementation of corporate governance mechanisms to detect earnings management through real activity is through the provision of discounts to temporarily increase sales, overproduction to report lower cost of sales and discretionary cost reductions to increase profits. The variables tested in this research consisted of commissioners characteristics (size, number of meetings, independence), audit committee characteristics (size, number of meetings, competence in the field of accounting and finance), the quality of external auditors and earnings management through real activities introduced by Roychowdhury (2006).

This research was conducted by performing an analysis of the implementation mechanisms of corporate governance and real earnings management practices during 2008 to 2009 at companies listed in Indonesia Stock Exchange and then analyzed with multiple regression. Then the proxy-proxy for corporate governance mechanisms were analyzed by partial about the impact on real earnings management.

The results showed that the size of the board of commissioners, the number of board meetings, audit committee size, number of meetings of audit committee and auditor quality no significant effect on earnings management through real activities manipulation. However, the independence of the board of commissioners and competence of audit committee would have a positive significant effect on earnings management through real activities manipulation. Implication of this research indicate that companies in Indonesia suspected of earnings management through real activities manipulation, but the mechanisms of corporate governance required by the regulator (Bapepam) proved unable to prevent it.

Keywords : corporate governance, board of directors, audit committees, auditor quality, earnings management through real activities manipulation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba yang dideteksi melalui manipulasi aktivitas riil yaitu melalui pemberian diskon untuk meningkatkan penjualan secara temporer, *overproduction* untuk melaporkan harga pokok penjualan yang rendah dan pengurangan biaya diskresioner untuk meningkatkan laba perusahaan. Variabel yang diuji pada penelitian ini terdiri dari karakteristik dewan komisaris (ukuran, jumlah rapat, independensi), karakteristik komite audit (ukuran, jumlah rapat, kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan), kualitas auditor eksternal, dan manajemen laba melalui aktivitas riil yang diperkenalkan oleh Roychowdhury (2006).

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis mengenai penerapan mekanisme *corporate governance* dan praktik manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil selama tahun 2008 sampai 2009 pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kemudian dianalisis dengan regresi berganda. Kemudian proksi-proksi mekanisme *corporate governance* dianalisis secara parsial mengenai pengaruhnya terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit dan kualitas auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil. Namun demikian, independensi dewan komisaris dan kompetensi komite audit justru berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia diduga melakukan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil, tetapi mekanisme *corporate governance* yang diwajibkan oleh pihak regulator (Bapepam) terbukti tidak dapat mencegahnya.

Kata kunci: *corporate governance*, dewan komisaris, komite audit, kualitas auditor, manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil

MOTO DAN PERSEMBAHAN

*“ Kesuksesan dan kebahagiaan tidak bergantung pada **dimana** kaki ini berpijak, melainkan bergantung pada **kemana** kaki ini melangkah ”*

“Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan”

(Qs.AL-Fatihah, 5)

Dengan penuh syukur kupersembahkan skripsi ini untuk :
Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, dukungan, bimbingan, serta doa yang tulus dalam setiap langkahku.
Trimakasihku sebagai tanda bakti kepadamu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **MANAJEMEN LABA YANG DIDETEKSI MELALUI MANIPULASI AKTIVITAS RIIL**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M. Si, Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Surya Raharja, S.E., M.Si., Akt, selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen wali yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dwi Ratmono SE., MSi., Akt, terima kasih telah meluangkan waktu, memberikan pendapat, masukan, bimbingan dan arahan selama ini.
4. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, serta doa dan kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih. Maafkan penulis jika jiwa dan raga ini belum sepenuhnya berbakti. Semoga Allah selalu memuliakan Ibu dan Bapak selamanya. Amin.
5. Seluruh staf pengajar, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas bantuan yang diberikan selama ini kepada penulis.

7. Kakak dan adikku tersayang, Mbak Anni, Mas Muhan dan Galan terima kasih atas dukungan kalian selama ini.
8. *My best friend*, Belle, Sheila, Hesti, Anind, Riri, Imuth dan Nano. Terima kasih untuk “persahabatan” yang telah menyatukan kita selama ini dan semoga untuk seterusnya. *I love U, guys...*
9. Teguh Heri Setiawan, terima kasih telah menjadi teman yang terbaik selama ini. Terima kasih atas segala masukan, ide, semangat, canda tawa, waktu dan doa yang telah diberikan selama ini.
10. Sahabat kecilku Riani, Satria terima kasih atas semangat tawa dan canda serta waktu yang telah kau luangkan untuk menemaniku dalam suka dan duka selama proses skripsi.
11. Teman-teman KKN Kalicari, terima kasih atas 30 hari yang menyenangkan dan mengesankan.
12. Teman-teman seperjuangan akuntansi 2007 atas kebersamaan dan semangatnya selama ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang.

Semarang, Mei 2011

Penulis

Winda Aryani

C2C007132

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	12
1.4 Sistematika Penulisan	13

2.4.3 Hubungan Kualitas Audit dengan Manajemen Laba Melalui Aktivitas Riil.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	55
3.1.1 Variabel Dependen.....	55
3.1.2 Variabel Independen.....	57
3.1.2.1 Karakteristik Dewan Komisaris.....	58
3.1.2.2 Karakteristik Komite Audit	59
3.1.2.3 Kualitas Audit	60
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	61
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	62
3.4 Metode Pengumpulan Data	62
3.5 Metode Analisis Data.....	63
3.5.1 Analisis Estimasi Model Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil.....	63
3.5.2 Analisis Deskriptif	63
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	63
3.5.3.1 Uji Normalitas	64
3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas	64
3.5.2.3 Uji Autokorelasi.....	64
3.5.2.3 Uji Multikolinearitas	65
3.5.3 Pengujian Hipotesis.....	65
3.5.3.1 Uji Pengaruh Simultan (F Test).....	67

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	67
3.5.3.3 Uji Parsial (t Test).....	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	71
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	71
4.2 Analisis Data	73
4.2.1 Estimasi Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil	73
4.2.2 Statistik Deskriptif	73
4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	78
4.2.3.1 Hasil Uji Normalitas	78
4.2.3.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	82
4.2.3.3 Hasil Uji Autokorelasi.....	83
4.2.3.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	84
4.2.4 Hasil Pengujian Hipotesis.....	86
4.2.4.1 Hasil Uji F (F test)	86
4.2.4.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	87
4.2.4.3 Hasil Uji t (t Test)	88
4.3 Interpretasi Hasil.....	92
4.3.1 Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil...	92
4.3.1.1 Ukuran Dewan Komisaris.....	92
4.3.1.2 Jumlah Rapat Dewan Komisaris	93
4.3.1.3 Independensi Dewan Komisaris.....	95

4.3.2 Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap	
Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil...	96
4.3.2.1 Ukuran Komite Audit	96
4.3.2.2 Jumlah Rapat Komite Audit.....	97
4.3.2.3 Kompetensi Komite Audit	98
4.3.3 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba	
Melalui Manipulasi Aktivitas Riil	99
BAB V PENUTUP.....	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Keterbatasan	102
5.3 Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	40
Tabel 3.1 Variabel penelitian dan definisi operasioanal variabel	55
Tabel 4.1 Ringkasan Perolehan Sampel Penelitian.....	70
Tabel 4.2 Demografi Sampel Penelitian.....	71
Tabel 4.3 Parameter Model Estimasi Manajemen Laba Melalui Aktivitas Riil	72
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif	73
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Sebelum Mengeluarkan Outlier.....	78
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Setelah Mengeluarkan Outlier.....	79
Tabel 4.7 Kriteria Penilaian <i>Durbin-Watson Test</i>	83
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi	83
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	84
Tabel 4.10 Hasil Uji F (<i>F Test</i>).....	85
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	86
Tabel 4.12 Hasil Uji t (<i>t Test</i>)	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur <i>Board of Director</i> dalam <i>One Tier System</i>	29
Gambar 2.2 Struktur <i>BoD</i> dan <i>BoC</i> dalam <i>Two Tiers System</i> yang berkembang di Indonesia	30
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	44
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	81

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel.....	107
Lampiran B Output SPSS Model Estimasi Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil	109
Lampiran C Output SPSS	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini laporan keuangan telah berkembang menjadi isu sentral. Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan, sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunistik manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya. Penyalahgunaan informasi ini dapat merugikan berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham dan investor (Boediono, 2005; Nuryaman 2008).

Isu kecurangan yang terkait dengan masalah akuntansi berkembang di berbagai negara di benua Amerika, Eropa maupun di Asia. Hal ini ditandai dengan munculnya kasus skandal pelaporan akuntansi perusahaan-perusahaan besar seperti Enron, Merck, World Com, Xerox, AHold dan lainnya yang kemudian memicu penelitian akuntansi yang lebih tajam khususnya untuk topik manajemen laba (Ujiantho dan Pramuka 2007; Subekti dkk, 2010). Beberapa kasus terkait dengan pelaporan keuangan yang terjadi di Indonesia, seperti pada PT Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk yang diduga melakukan manipulasi laba juga ikut mendorong penelitian lebih lanjut tentang praktik manipulasi laba di Indonesia (Boediono, 2005). Perilaku manajemen untuk memanipulasi laba sesuai dengan keinginannya tersebut, dikenal dengan istilah manajemen laba (*earnings management*).

Menurut Beneish (2001) dalam Nuryaman (2008), manajemen laba timbul sebagai dampak persoalan keagenan, yaitu adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemilik dan manajemen. Pemilik perusahaan sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan kewenangan atas pengelolaan perusahaan kepada *professional managers*. Sebagai konsekuensinya penggunaan sumber daya perusahaan sepenuhnya ada di tangan para eksekutif. Hal ini mengakibatkan manajemen memegang kendali yang efektif atas kepentingan perusahaan (Riyanto, 2005; Chavelas dan Christos, 2010).

Riyanto (2005) juga menyatakan bahwa pemegang saham mengharapkan manajemen dapat bertindak secara profesional, segala keputusan yang diambil didasarkan pada kepentingan pemegang saham. Dengan kata lain, semua yang dilakukan manajemen untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Namun, yang sering terjadi adalah keputusan yang diambil manajemen tidak semata-mata untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga untuk kepentingan para manajer itu sendiri. Sejalan dengan pernyataan Riyanto (2005), Chavelas dan Christos (2010) juga berpendapat bahwa pengelola perusahaan akan mengejar tujuan pribadinya, bahkan dengan mengorbankan kepentingan kelompok *stakeholder* lainnya. Menurut Darmawati dkk (2005), adanya tindakan mementingkan diri sendiri dipihak manajer perusahaan merupakan ciri utama dari lemahnya *corporate governance*. Hal ini didukung oleh Berghe dan Ridder dalam Darmawati dkk (2005), bahwa perusahaan yang mempunyai *poor performance* disebabkan oleh *poor governance*.

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga digunakan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004 dalam Ujiantho dan Pramuka, 2007). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah satu cara yang digunakan untuk memonitor dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen adalah *corporate governance*. Dengan menerapkan *corporate governance* dengan baik, diharapkan dapat mengurangi kesempatan manajer untuk melakukan tindakan manipulasi (Ujiantho dan Pramuka, 2007). Dengan demikian kinerja yang dilaporkan oleh manajemen mampu merefleksikan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan bersangkutan.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba menarik untuk dilakukan. Hal ini karena secara empiris Indonesia berada pada kelompok negara dengan rata-rata manajemen laba tinggi dan tingkat proteksi investor yang relatif rendah (U-Thai, 2005 dalam Nuryaman, 2008). Selain praktik manajemen laba yang tinggi serta proteksi investor yang relatif rendah, penerapan mekanisme *corporate governance* di Indonesia pun dinilai masih lemah. Seperti yang diungkapkan oleh Djatmiko (2010) bahwa:

“ Sudah sedasawarsa lebih wacana tentang tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) digulirkan. Ternyata, semakin hari, tema ini semakin relevan. Dalam konteks Indonesia, malah kian aktual. Contohnya..., ya kasus Gayus Halomoan Tambunan, sang tersangka kasus pajak. Seperti banyak diberitakan, ketika diperiksa sebagai saksi pada 28 September 2010, Gayus mengaku menerima suap Rp 30

miliar ketika membantu persoalan pajak tiga perusahaan milik Grup Bakrie: Kaltim Prima Coal, Bumi Resources dan Arutmin...”.

Berdasarkan pernyataan tersebut didapat suatu kesimpulan bahwa terungkapnya kasus Gayus membuktikan lemahnya praktik GCG di Indonesia. Perusahaan yang telah *go public*, dimana merupakan institusi yang mestinya berada di garda terdepan dalam penerapan GCG diduga ikut andil dalam kasus manipulasi data keuangan. Hal ini jelas telah melanggar prinsip-prinsip GCG yang seharusnya dijadikan dasar oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006) dalam pengelolaan perusahaan yang baik, perusahaan harus mendasarkan pengelolaannya sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accoutanbility*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Lemahnya penerapan mekanisme *corporate governance* diduga berpengaruh terhadap tingginya praktik manajemen laba yang terjadi di Indonesia. Hal ini didukung oleh Ujiantho dan Pramuka (2007) bahwa praktik manipulasi yang dilakukan oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan antara *agent* dan *principle*, dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring seperti mekanisme *corporate governance*. Syakchroza (2005) dalam Petronila (2007) membedakan *corporate governance mechanism* menjadi *internal corporate governance mechanism* dan *external corporate governance mechanism*. Mekanisme *corporate governance* yang bersifat internal merupakan interaksi antara pihak-pihak pengambil keputusan dalam perusahaan yang mencakup

Dewan Direksi (*Board of Director*), Dewan Komisaris (*Board of Commisioner*), *Executive Management* yang didalamnya termasuk Komite Audit (*Audit Committee*) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan mekanisme *corporate governace* yang bersifat eksternal merupakan interaksi antara pihak-pihak yang mengawasi kinerja perusahaan, antara lain *stakeholder* (karyawan, konsumen, pemasok, kreditur, masyarakat) dan *reputational agents* (akuntan, pengacara, badan pemeringkat kredit, manajer investasi). Penerapan mekanisme *corporate governance* bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan, yaitu melalui peran monitoring dari internal maupun eksternal perusahaan, diantaranya yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Komite Audit serta auditor eksternal (kualitas audit).

Dechow *et al.*, (1996) dan Beasley (1996) dalam Ujiantho dan Pramuka (2007), menemukan hubungan yang signifikan antara peran Dewan Komisaris dengan pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi Dewan Komisaris mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memonitor proses pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2010) menemukan bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Berapapun jumlah Dewan Komisaris yang ada dalam perusahaan tidak akan mempengaruhi praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Pujiastuti (2010) bahwa Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap besarnya *working capital accrual* yaitu bahwa komposisi Dewan Komisaris mampu mengurangi praktik manajemen laba di perusahaan.

Penelitian Nuryaman (2008) menemukan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Boediono (2005); Veronika dan Utama (2005); serta Ujiyantho dan Pramuka (2007) bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Akan tetapi penelitian Andayani (2010) menemukan hasil yang berlawanan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Komisaris Independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring. Pengawasan komisaris independen yang efektif akan mengurangi masalah agensi yang timbul. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen akan menjadikan manajer atau agen berhati-hati dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga akan tercipta iklim yang lebih objektif.

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite yang mendukung pelaksanaan GCG dalam perusahaan, salah satunya adalah Komite Audit (Waryanto, 2010). Menurut Alijoyo (2003) dalam Waryanto (2010), Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan; menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan; meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit; dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Dengan demikian, hasil pengungkapan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat memiliki tingkat keandalan atau reliabilitas yang tinggi.

Hasil penemuan Foker (1992) dalam Said *et.al.*, (2009) yang dikutip dari Waryanto (2010) menyatakan bahwa keberadaan Komite Audit dapat mengurangi biaya agensi, dan meningkatkan pengendalian internal serta meningkatkan kualitas pengungkapan. Namun, Veronica dan Utama (2005) menemukan hasil yang bertentangan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Selain menyoroti faktor internal mekanisme *corporate governance* yaitu melalui karakteristik Dewan Komisaris dan karakteristik Komite Audit, faktor eksternal pun juga perlu dipertimbangkan untuk melihat secara menyeluruh elemen-elemen *corporate governance*. Menurut Syakchroza (2005) dalam Petronila (2007) *reputational agents* seperti auditor eksternal merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang bersifat eksternal. Menurut Herawaty (2008) kualitas audit yang dilihat dari peran auditor yang memiliki kompetensi memadai dan mempunyai sikap independen, mampu menjadi pihak yang dapat memberikan kepastian terhadap integritas angka-angka akuntansi yang dilaporkan oleh manajemen.

Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan mekanisme *corporate governance* terhadap praktik manajemen laba. Dalam konsep penelitian ini indikator mekanisme *corporate governance* terdiri dari: karakteristik Dewan Komisaris, karakteristik Komite Audit serta kualitas audit yang dinilai dari kualitas auditor eksternal perusahaan. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang diharapkan mampu mengatasi konflik kepentingan antara agent dan principle (masalah agensi),

sehingga masalah akuntansi seperti manipulasi data keuangan dapat diminimalisir. Selain itu, adanya kontradiksi hasil penelitian (*research gap*) yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang memfokuskan pada teknik manajemen laba berbasis akrual (*accrual-based earnings management*), penelitian ini mencoba menggunakan konsep manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil (*earnings management through real activities manipulation*) untuk mendeteksi terjadinya praktik manajemen laba. Konsep manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil merupakan konsep yang dikenalkan oleh Roychowdhury (2006) untuk mendeteksi praktik manajemen laba melalui pendekatan aktivitas riil perusahaan. Manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil cenderung dilakukan oleh perusahaan yang kinerjanya menurun dengan motif untuk menghindari laba nol dan laba negatif. praktik manajemen laba ini dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu: manipulasi arus kas operasi, biaya produksi, dan biaya-biaya diskresioner.

Penelitian yang dilakukan oleh Zang (2006) menemukan bukti empiris bahwa perusahaan tidak hanya menggunakan satu teknik saja melainkan menggunakan berbagai teknik manajemen laba untuk mencapai target laba. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menggunakan konsep manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil sebagai pendeteksi manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa penelitian manajemen laba terkini juga menyatakan pentingnya memahami bagaimana perusahaan melakukan manajemen laba

melalui manipulasi aktivitas riil selain manajemen laba berbasis akrual (Roychowdhury, 2006; Gunny, 2005; Zhang, 2006; Cohen *et al.*, 2008; Cohen dan Zarowin, 2010 dalam Ratmono, 2010). Selain itu, adanya bukti empiris yang menunjukkan bahwa ada pergeseran cara yang digunakan manajemen dalam melakukan manajemen laba. Penelitian Cohen *et al.*, (2008) dalam Ratmono (2010), menemukan bahwa manajer sudah bergeser menjauh dari manajemen laba akrual menuju ke manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil setelah periode Sarbanes Oxley Act (SOX). Graham *et al.*, (2005) dalam Ratmono (2010) juga memberikan bukti empiris bahwa para manajer cenderung melakukan aktivitas manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil dibandingkan dengan manajemen laba akrual untuk menghindari deteksi yang dilakukan auditor dan regulator. Hal ini dikarenakan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil sulit dibedakan dengan keputusan bisnis optimal sehingga lebih sulit dideteksi.

Pergeseran dari manajemen akrual ke manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil menurut Roychowdhury (2006) disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, manipulasi akrual kemungkinan besar akan menarik perhatian auditor dan regulator dibanding dengan keputusan-keputusan riil, seperti penetapan harga dan produksi. Kedua, manajer yang mengandalkan pada manipulasi akrual saja akan berisiko jika realisasi akhir tahun defisit antara laba yang tidak dimanipulasi dengan target laba yang diinginkan melebihi jumlah yang dimungkinkan untuk memanipulasi akrual setelah akhir periode fiskal. Target laba yang tidak tercapai dianggap manajer tidak mempunyai kinerja yang baik sehingga kesempatan mendapatkan kompensasi akan hilang atau bahkan bisa berujung pada pemecatan

manajer. Dengan demikian manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil merupakan jalan yang aman untuk mencapai target laba karena dapat dilakukan sepanjang periode operasi perusahaan sehingga munculnya kemungkinan laba kurang dari target dapat dihindari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diproses dengan karakteristik Dewan Komisaris, karakteristik Komite Audit dan kualitas audit terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian dengan judul **“MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN MANAJEMEN LABA MELALUI MANIPULASI AKTIVITAS RIIL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sudah banyak penelitian yang meneliti masalah tindakan oportunistik manajemen, diantaranya yaitu mengenai praktik manajemen laba. Dari bukti empiris ditemukan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat praktik manajemen laba yang tinggi dan dengan tingkat perlindungan investor yang rendah. Ini semua merupakan dampak dari konflik hubungan keagenan. Menurut Ujiantho dan Pramuka (2007), konflik dari hubungan keagenan ini dapat diatasi dengan penerapan mekanisme *corporate governance*. Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa penerapan mekanisme *corporate governance* mampu mengurangi kecenderungan manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba aktual.

Perkembangan penelitian terkini menunjukkan bahwa ada pergeseran praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan yaitu dari manipulasi akrual menuju ke manipulasi aktivitas riil. Penelitian sebelumnya diantaranya yang dilakukan oleh Ratmono (2010) mengindikasikan bahwa Indonesia juga terdeteksi melakukan praktik manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil selain manipulasi akrual. Penerapan mekanisme *corporate governance* dipercaya dapat meminimalisir perilaku manajemen dalam melakukan manipulasi laba. Permasalahannya adalah apakah manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil juga dapat diminimalisir dengan mekanisme *good corporate governance*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti berkaitan dengan pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil dituangkan melalui pertanyaan berikut:

1. Apakah karakteristik Dewan Komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil?
2. Apakah karakteristik komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh karakteristik Dewan Komisaris terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.
2. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh karakteristik Komite Audit terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.
3. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, diantaranya yaitu:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau tambahan literatur mengenai pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* terhadap praktik manajemen laba di Indonesia khususnya yang dideteksi melalui aktivitas riil. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik pada masa yang akan datang mengenai masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian.

2. Bagi Investor dan Kreditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan yang *go public* di Indonesia sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan terkait dengan pengambilan keputusan baik keputusan investasi, kredit maupun keputusan sejenis lainnya.

3. Bagi Regulator

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi mengenai keefektifan regulasi penerapan mekanisme *corporate governance* di Indonesia sehingga dapat menetapkan standar yang lebih baik dimasa yang akan datang.

4. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami pengaruh penerapan mekanisme *corporate governance* terhadap praktek manajemen laba yang dilakukan perusahaan khususnya melalui manipulasi aktivitas riil dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran menyeluruh mengenai isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian landasan teori yang melandasi *corporate governance* dan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas,

kajian penelitian-penelitian sebelumnya, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari deskripsi variabel dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian. Selain itu bab ini juga menguraikan tentang analisis data dan interpretasi data berdasarkan alat dan teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori keagenan berkaitan dengan hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Dalam teori ini yang dimaksud dengan *principal* adalah pemegang saham atau investor, sedangkan yang dimaksud *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan oleh investor dan pengendalian oleh pihak manajemen. Pemisahan fungsi kepemilikan dan pengendalian ini akan menimbulkan suatu konflik diantara mereka. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen dapat terjadi karena adanya kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*.

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Informasi yang diberikan dapat dilakukan melalui

pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Namun, pada kenyataannya manajer terkadang tidak menyampaikan informasi akuntansi yang mencerminkan keadaan sebenarnya. Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*).

Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Penelitian Richardson (1998) dalam Ujiantho dan Pramuka (2007) menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba.

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka dan tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan kedalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor. Selain itu *corporate governace* berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997 dalam Darmawati et al. 2005). Dengan kata lain *corporate governance* dapat digunakan untuk memonitor dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen yang merupakan akibat dari hubungan keagenan.

2.1.2 Manajemen Laba

Beberapa peneliti mendefinisikan manajemen laba dalam arti yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa definisi tentang manajemen laba (*Earnings management*) diantaranya, yaitu:

1. Schipper (1989) dalam Rahmawati (2007)

Manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi.

2. Scoot (2000) dalam Rahmawati (2007)

Membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan *political cost (opportunistic Earnings Management)*. Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting (Efficient Earnings Management)*, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai saham perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

3. Healy dan Wahlen (2000) dalam Herawaty (2008)

Manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan pertimbangan (*judgement*) dalam pelaporan keuangan yang dapat merubah laporan keuangan sehingga menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

4. Nuryaman (2008)

Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan laba. Manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi, membuat kebijakan-kebijakan (*discretionary*) yang dapat mempercepat atau menunda biaya-biaya dan pendapatan, agar laba perusahaan lebih kecil atau besar sesuai dengan yang diharapkan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan perilaku oportunistik manajemen dengan cara ikut campur (mempengaruhi) proses pelaporan keuangan untuk mengejar tujuan pribadinya sendiri sehingga dapat menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Menurut Setiawati dan Na'im (2000) dalam Rahmawati et al., (2007) manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan dan menambah bias laporan keuangan. Hal ini dapat merugikan pemakai laporan keuangan karena mereka mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa.

Menurut Beneish (2001) dalam Nuryaman (2008), manajemen laba timbul sebagai dampak persoalan keagenan, yaitu adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemilik dan manajemen. Manajer memiliki informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan pihak eksternal. Ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi) ini menyebabkan timbulnya persoalan keagenan. Pemilik perusahaan sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan kewenangan atas pengelolaan perusahaan kepada *professional managers*. Sebagai konsekuensinya penggunaan sumber daya perusahaan sepenuhnya ada di tangan para eksekutif. Hal ini mengakibatkan manajemen memegang kendali yang efektif atas kepentingan perusahaan (Riyanto, 2005; Chavelas dan Christos, 2010). Keadaan yang demikian akan memberi keleluasaan dan kesempatan kepada pihak manajemen untuk melakukan rekayasa laba atau manajemen laba (*earnings management*).

Menurut Watt dan Zimmerman (1986) dalam Rahmawati (2007), terdapat tiga hipotesis yang mendorong praktek manajemen laba, yaitu:

1. *Bonus Plan Hypothesis*

Hipotesis program bonus didasarkan adanya dorongan manajer perusahaan untuk mendapatkan bonus berdasarkan laba yang dilaporkan oleh manajer sehingga akan mendorong manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser laba dari periode yang akan datang ke periode saat ini;

2. *Debt Covenant Hypothesis*

Hipotesis perjanjian utang disebabkan oleh munculnya perjanjian kontrak antara manajer dan perusahaan yang berbasis kompensasi manajerial.

3. *Political Cost Hypothesis*

Hipotesis biaya politik timbul karena manajemen memanfaatkan kelemahan akuntansi yang menggunakan estimasi akrual serta pemilihan metode akuntansi dalam rangka menghadapi berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Teknik manajemen laba menurut Setiawati dan Na'im (2000) dalam Rahmawati (2007) dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Memanfaatkan Peluang Untuk Membuat Estimasi Akuntansi

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgment* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tidak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tidak berwujud, estimasi garansi, dan lain-lain.

2. Mengubah Metode Akuntansi

Perubahan metode akuntansi dapat dilakukan untuk mencatat suatu transaksi. Contoh: merubah metode depresiasi aktiva tetap dari angka tahun menjadi depresiasi garis lurus.

3. Menggeser Periode Biaya Atau Pendapatan

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat /menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran

promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai.

Pola-pola manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan menurut Scott (2000) dalam Rahmawati (2007) adalah dengan cara:

1. *Taking a bath*

Pola ini terjadi selama periode pada saat terjadinya reorganisasi seperti adanya pergantian CEO baru. Jika manajer merasa harus melaporkan kerugian maka ia akan melaporkan dalam jumlah yang besar. Dengan tindakan ini, manajer berharap dapat meningkatkan laba yang akan datang dan kesalahan atas kerugian perusahaan dapat dilimpahkan pada manajer lama.

2. *Income minimization*

Perusahaan akan meminimumkan laba pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapatkan perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebanan pengeluaran iklan serta riset dan pengembangan yang cepat.

3. *Income maximization*

Manajer mungkin memaksimalkan laba bersih yang dilaporkan untuk tujuan bonus. Perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian utang mungkin juga akan memaksimumkan pendapatan dengan tujuan agar kreditur masih memberikan kepercayaan pada perusahaan tersebut.

4. *Income smoothing*

Sarana yang digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas urutan-urutan pelaporan penghasilan relatif terhadap beberapa urutan target yang terlibat karena adanya manipulasi variabel-variabel transaksi riil.

2.1.2.1 Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil

Laba merupakan salah satu parameter mengenai baik buruknya kinerja suatu perusahaan. Informasi laba akan menjadi objek perhatian utama bagi investor dan kreditur karena melalui informasi laba ini mereka mengevaluasi kinerja manajemen. Oleh karena itu, manajemen berkepentingan untuk memperbaiki laba perusahaan, baik melalui cara yang benar yaitu meningkatkan kinerja perusahaan atau melakukan manajemen laba untuk mencapai kinerja agar tampak baik. Menurut Oktorina dan Hutagaol (2008) tujuan manajemen laba adalah untuk menghindari kerugian, mendapatkan kompensasi, memenuhi target laba, dan ramalan analis (*analyst forecast*).

Salah satu praktik manajemen laba yang lazim dilakukan manajemen yaitu dengan cara memanipulasi akrual murni (*pure accrual*). Metode ini disebut dengan manipulasi akrual (*discretionary accrual*), dimana tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap arus kas (Roychowdhury, 2003 dalam Oktorina dan Hutagaol, 2008). Manajemen akrual dilakukan pada akhir periode akuntansi dimana manajer mengetahui laba sebelum dimanipulasi sehingga dapat mengetahui berapa besar laba yang harus dimanipulasi agar target laba yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Menurut Oktorina dan Hutagaol (2008) manipulasi dengan cara ini dibatasi oleh GAAP (*General Accepted Accounting*

Principle) dan manipulasi akrual ditahun-tahun sebelumnya. Selain itu, manipulasi ini dapat dideteksi oleh auditor, investor maupun badan pemerintah sehingga dapat berdampak pada harga saham bahkan menyebabkan kebangkrutan atau kasus hukum.

Beberapa penelitian laba terdahulu memfokuskan pada teknik manajemen laba berbasis akrual. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa ada pergeseran cara yang digunakan manajemen dalam melakukan manajemen laba. Penelitian Cohen et al (2008) yang dikutip dari Ratmono (2010), menemukan bahwa manajer sudah bergeser menjauh dari manajemen laba akrual menuju ke manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil setelah periode *Sarbanes Oxley Act* (SOX).

Pergeseran dari manajemen akrual ke manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil menurut Roychowdhury (2006) disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, manipulasi akrual kemungkinan besar akan menarik perhatian auditor dan regulator dibanding dengan keputusan-keputusan riil, seperti penetapan harga dan produksi. Kedua, manajer yang mengandalkan pada manipulasi akrual saja akan beresiko jika realisasi akhir tahun defisit antara laba yang tidak dimanipulasi dengan target laba yang diinginkan melebihi jumlah yang dimungkinkan untuk memanipulasi akrual setelah akhir periode fiskal. Untuk kasus di Indonesia, Ratmono (2010) menemukan bukti empiris bahwa selain melakukan manajemen laba berbasis akrual, perusahaan publik di Indonesia juga melakukan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil, selain itu penelitian ini menemukan bahwa manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil lebih sulit dideteksi oleh auditor.

Manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan manajemen yang menyimpang dari praktek bisnis perusahaan normal yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mencapai target laba yang diharapkan (Roychowdhury, 2006). Praktik ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang kinerjanya menurun dengan motif untuk menghindari laba nol dan laba negatif. Manajemen laba ini merupakan manipulasi yang dilakukan oleh manajemen melalui aktivitas sehari-hari perusahaan selama periode berjalan. Oleh karena itu manipulasi melalui cara ini dapat dilakukan kapan saja sepanjang periode akuntansi berjalan. Menurut Roychowdhury (2006); Cohen *et al.*, (2008); Cohen dan Zarowin (2010) dalam Ratmono (2010), terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam manipulasi aktivitas riil, yaitu:

1. Manipulasi penjualan

Manipulasi penjualan merupakan usaha untuk meningkatkan penjualan secara temporer dalam periode tertentu dengan menawarkan diskon harga produk secara berlebihan atau memberikan persyaratan kredit yang lebih lunak. Strategi ini dapat meningkatkan volume penjualan dan laba periode saat ini, dengan mengasumsikan marginnya positif. Meskipun volume penjualan meningkat dan menyebabkan laba tahun berjalan tinggi namun arus kas menurun karena arus kas masuk kecil akibat penjualan kredit dan potongan harga.

2. Pengurangan beban-beban diskresionari (*discretionary expenditures*)

Perusahaan dapat menurunkan *discretionary expenditures* seperti beban penelitian dan pengembangan, iklan, dan penjualan, administrasi, dan

umum terutama dalam periode di mana pengeluaran tersebut tidak langsung menyebabkan pendapatan dan laba. Strategi ini dapat meningkatkan laba dan arus kas periode saat ini namun dengan risiko menurunkan arus kas periode mendatang.

3. Produksi Besar-besaran (*Overproduction*)

Untuk meningkatkan laba, manajer perusahaan dapat memproduksi lebih banyak daripada yang diperlukan dengan asumsi bahwa tingkat produksi yang lebih tinggi akan menyebabkan biaya tetap per unit produk lebih rendah. Strategi ini dapat menurunkan kos barang terjual (*cost of goods sold*) dan meningkatkan laba operasi.

Ketiga cara manipulasi aktivitas riil di atas biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan kinerja yang buruk sehingga tidak banyak memiliki akrual untuk dimanipulasi. Satu-satunya cara adalah dengan manipulasi aktivitas riil terutama untuk mencapai laba sedikit di atas nol. Dengan ketiga cara di atas perusahaan-perusahaan yang diduga (*suspect*) melakukan manipulasi aktivitas riil akan mempunyai *abnormal cash flow operations (CFO)* dan *abnormal discretionary expenses* yang lebih kecil serta *abnormal production cost* yang lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Dalam penelitiannya, Ratmono (2010) menemukan bukti bahwa perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dengan kinerja keuangan yang buruk (*suspect*) terbukti melakukan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.

2.1.3 Mekanisme *Corporate Governance*

Corporate governance menyangkut masalah pengendalian perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham). Mekanisme *corporate governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang mampu menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Monks, 2003 dalam Kaihatu, 2006). Tjager et al., (2003) dalam Petronila (2007) mendefinisikan mekanisme *corporate governance* sebagai suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Mekanisme *corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Sedangkan definisi *corporate governance* menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) adalah:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.

Dengan adanya *good corporate governace* maka pengawasan terhadap perusahaan juga akan semakin baik sehingga tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dapat diminimalisir. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip GCG yang telah disebutkan dalam

Pedoman Umum *Good Corporate Governace* Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) 2006. Prinsip-prinsip tersebut meliputi lima aspek, yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Proses untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip GCG kedalam tubuh atau struktur suatu perusahaan memerlukan waktu yang panjang dan melalui proses yang kompleks serta memerlukan komitmen yang tinggi dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Untuk mewujudkan terciptanya *good corporate governance*, prinsip-prinsip tersebut harus dapat dicapai oleh perusahaan, dengan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar perusahaan (Solihin 2009, dalam Waryanto, 2010). Untuk memastikan *good corporate governance* dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan maka diperlukan suatu *mekanisme corporate governance*. Mekanisme diarahkan untuk menjamin dan mengawasi jalannya sistem *governance* dalam suatu perusahaan (Syakhroza, 2002a, 2002b dalam Petronila, 2007).

Merupakan hal yang sia-sia bahkan berbahaya apabila para pelaku usaha sekedar mengikuti trend atau kepatuhan terhadap regulasi saja tanpa memahami makna dan manfaat GCG. Apabila hal ini yang terjadi maka praktik dan system

yang baik ini hanya akan menjadi retorika, slogan, atau aksesoris yang tidak berguna (Petronila, 2007). Dewan Komisaris, Komite Audit serta Auditor Eksternal merupakan pihak-pihak yang memegang peranan kunci pelaksanaan *corporate governance*.

2.1.3.1 Karakteristik Dewan Komisaris

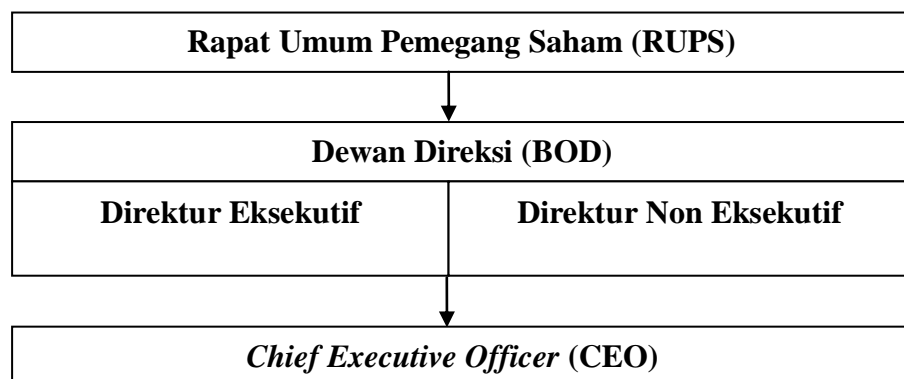
Terdapat dua sistem manajemen yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda (FCGI, 2002) yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris yaitu:

1. Sistem Satu Tingkat (*One Tier System*)

Sistem satu tingkat berasal dari Sistem Hukum Anglo Saxon. Dalam sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu Dewan Direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan Direktur Independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (Non Direktur Eksekutif). Negara-negara yang menggunakan One Tier System misalnya adalah Amerika dan Inggris.

Gambar 2.1

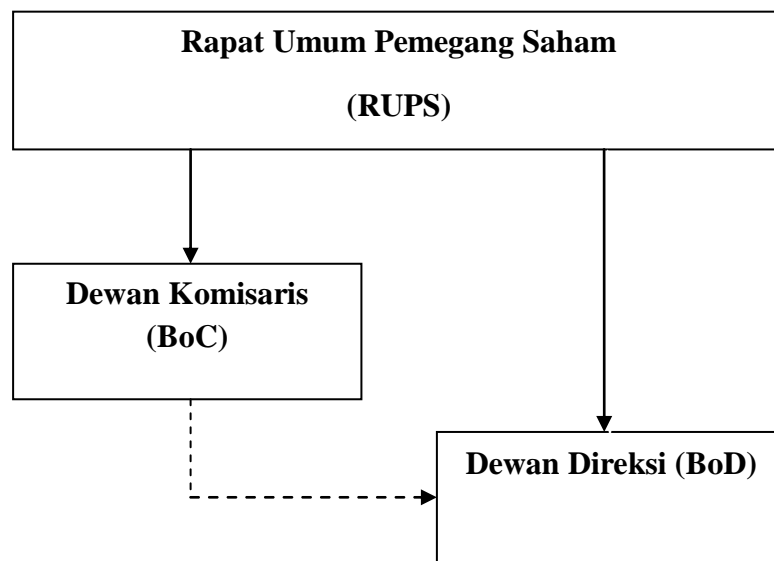
Struktur *Board of Director* dalam *One Tier System*



2. Sistem Dua Tingkat (*Two Tiers System*)

Sistem Dua Tingkat berasal dari Sistem Hukum Kontinental Eropa. Dalam sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Dewan Direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan dibawah pengawasan dan pengarahan Dewan Komisaris. Dewan Direksi juga harus memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dan juga menjawab hal-hal yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Sehingga Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Negara-negara yang menggunakan Two Tiers System adalah Denmark, Jerman, Belanda, Jepang dan termasuk juga Indonesia.

Gambar 2.2
Struktur *BoD* dan *BoC* dalam *Two Tiers System* yang berkembang di Indonesia



Sumber: FCGI (2002)

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan GCG sesuai dengan aturan. Tugas dari dewan komisaris yang dirumuskan oleh FCGI , antara lain :

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
4. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan jika perlu.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama

sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris (KNKG, 2006). Agar pelaksanaan tugas Dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu memenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota Dewan Komisaris harus professional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan sampai kepada pemberhentian sementara.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Dewan Komisaris terdiri dari komisaris independen dan non independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota

Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam katagori terafiliasi (KNKG, 2006).

Keberadaan Komisaris Independen diatur dalam Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 (FCGI, 2002). Dikemukakan bahwa perusahaan yang *lised* di bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (bukan *controlling shareholder*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Independensi dewan komisaris berkaitan dengan jumlah dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (dewan komisaris independen). Semakin besar jumlah dewan komisaris independen maka independensi dewan komisaris dikatakan semakin baik.

2.1.3.2 Karakteristik Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite-komite yang dapat membantu pelaksanaan tugasnya. Salah satunya adalah komite audit, yang memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (FCGI, 2002). Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*), adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan

gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*). Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Dalam Pedoman GCG Indonesia (KNKG, 2006) dijelaskan bahwa komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (1) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (2) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (3) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (4) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Sedangkan tujuan komite audit sesuai yang dinyatakan dalam Surat Edaran Bapepam Nomor: SE-03/PM/2000 adalah membantu dewan komisaris untuk:

- a) Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan;
- b) Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan;
- c) Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit;
- d) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Selain itu, menurut KNKG (2006), jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap dampak lingkungan, komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi atau keuangan.

Komite audit harus terdiri dari individu-individu yang independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta objektif dalam menangani permasalahan (FCGI, 2002). Dengan demikian terlihat bahwa komite audit

memiliki peranan yang penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi sehingga apabila fungsi dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik, maka hal ini akan mendorong perusahaan untuk selalu bertanggung jawab kepada kepentingan seluruh *stakeholder*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba yang diukur melalui aktivitas akrual telah banyak diteliti sebelumnya. Diantaranya yang dilakukan oleh Boediono (2005) yang mencoba meneliti kualitas laba melalui studi pengaruh mekanisme *corporate governance* dan manajemen laba dengan menggunakan analisis jalur. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komposisi dewan komisaris. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme *corporate governance* secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional, manajerial dan komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba selain itu mekanisme *corporate governance* bersama dengan manajemen laba akan berpengaruh terhadap kualitas laba.

Ujiantho dan Pramuka (2007) mencari hubungan mekanisme *corporate governance* dan manajemen laba terhadap kualitas laba yang dilaporkan perusahaan. Variabel independen yang digunakan antara lain kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran dewan komisaris. Dari penelitian ini ditemukan bahwa kepemilikan institusional dan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap

manajemen laba tetapi kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan proporsi dewan komisaris justru berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Namun demikian penelitian ini menemukan bahwa secara bersama-sama mekanisme *corporate governance* teruji signifikan terhadap manajemen laba.

Murhadi (2009) menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan independen board, keberadaan komite audit, *CEO duality*, *top share* dan koalisi pemegang saham sebagai variabel independen. Dan hasilnya menemukan bahwa hanya *CEO duality* dan *top share* saja yang berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiatmaja (2010) berusaha meneliti pengaruh antara mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba dan konsekuensi manajemen laba terhadap kinerja keuangan. Menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris dan ukuran komite audit sebagai proksi *corporate governance*. Penelitian menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan manajerial dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Selain itu juga ditemukan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Hampir sama dengan Widiatmaja (2010), Ningsaptiti (2010) juga menganalisis mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba. Dari penelitian ini ditemukan bahwa ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan spesialisasi industri KAP berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan untuk variabel komposisi dewan komisaris, komposisi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Tidak berbeda jauh dengan kedua penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan Suryani (2010) juga meneliti tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dari penelitian ini ditemukan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba sedangkan ukuran dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Andayani (2010) mencoba menguji pengaruh karakteristik dewan komisaris independen terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dari penelitian ini ditemukan bukti bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Namun, bagi komisaris independen yang merangkap jabatan pada perusahaan lain akan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Praditia (2010) menganalisis tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba dan nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2005-2008. Hasil penelitian ini

adalah semua variabel independen yaitu terdiri dari komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan hanya komisaris independen yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Sedangkan penelitian yang membahas mengenai manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil masih jarang dilakukan jika dibandingkan dengan manajemen laba berbasis akrual. Beberapa penelitian tersebut antara lain yang dilakukan oleh Ratmono (2010). Penelitian tersebut meneliti apakah manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil juga dilakukan di Indonesia dan apakah auditor yang berkualitas mendeteksi manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil lebih sulit daripada berbasis akrual. Dari penelitian ini berhasil menemukan bukti empiris bahwa perusahaan-perusahaan publik di Indonesia melakukan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil dengan tujuan menghindari melaporkan kerugian tahunan. auditor yang mempunyai spesialisasi industri akan dapat mendeteksi pengaturan akrual klien sehingga melakukan pembatasan terhadap besarnya akrual diskresionari dan terbukti bahwa manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil lebih sulit dideteksi oleh auditor daripada manajemen laba berbasis akrual.

Aprilia (2010) mencoba mengindikasikan praktik manajemen laba melalui aktivitas riil. Dari penelitian ini ditemukan bahwa perusahaan di Indonesia terindikasi secara signifikan melakukan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil arus kas operasi saat *right issue*. Namun, perusahaan di Indonesia

tidak terindikasi secara signifikan melakukan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil aktivitas produksi dan biaya diskresionari.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Judul	Variabel	Hasil
1	Boediono (2005)	Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur	Independen: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris Dependen: manajemen laba, kualitas laba	1. Mekanisme corporate governance secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba. 2. Kepemilikan institusional, manajerial dan komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. 3. Mekanisme corporate governance bersama dengan manajemen laba berpengaruh terhadap kualitas laba.
2	Ujiantho dan Pramuka (2007)	Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan	Independen: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris. Dependen: manajemen laba dan kinerja keuangan	1. Kepemilikan institusional dan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 3. Proporsi dewan komisaris berpengaruh positif

				<p>signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>4. Secara bersama-sama mekanisme <i>corporate governance</i> teruji signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>5. Manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.</p>
3	Murhadi (2009)	Studi Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Praktik <i>Earnings Management</i> pada Perusahaan Terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia	<p>Independen: independen board, keberadaan komite audit, <i>CEO duality</i>, <i>top share</i>, koalisi pemegang saham.</p> <p>Dependen: manajemen laba</p>	1. Hanya <i>CEO duality</i> dan <i>top share</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
4	Widiatmaja (2010)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governane</i> Terhadap Manajemen Laba dan Konsekuensi Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan	<p>Independen: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, ukuran komite audit.</p> <p>Dependen : manajemen laba, kinerja keuangan.</p>	<p>1. Kepemilikan manajerial dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>2. Kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>3. Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.</p>
5	Ningsaptiti (2010)	Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Mekanisme	Independen : ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan,	1. Ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan spesialisasi industri KAP berpengaruh

		<i>Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Laba	komposisi anggota dewan komisaris, spesialisasi industri KAP, komposisi komite audit. Dependen : manajemen laba	signifikan terhadap manajemen laba. 2. Komposisi dewan komisaris, komposisi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
6	Suryani (2010)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI	Independen: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, ukuran perusahaan Dependen: manajemen laba	1. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. 2. Ukuran dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
7	Andayani (2010)	Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	Independen: proporsi komisaris independen, komisaris independen yang merangkap jabatan Dependen: manajemen laba	1. Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 2. Komisaris independen yang merangkap jabatan pada perusahaan lain berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 3. Terdapat perbedaan manajemen laba sebelum peraturan diberlakukan dan setelah diberlakukan
8	Praditia (2010)	Analisis Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	Independen: komisaris independen, kepemilikan manajerial,	1. Semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

		terhadap Manajemen Laba dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada tahun 2005-2008	kepemilikan institusional, kualitas auditor. Dependen: manajemen laba, nilai perusahaan	2. Hanya komisaris independen yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
9	Ratmono (2010)	Manajemen Laba Riil dan Berbasis Akrua: Dapatkah Auditor yang Berkualitas Mendeteksinya	Manajemen laba berbasis akrual, manajemen laba riil, kualitas auditor	1. Praktek manajemen laba riil dilakukan oleh perusahaan publik di Indonesia dengan kinerja yang buruk 2. Auditor lebih sulit mendeteksi manajemen laba riil dibandingkan dengan akrual
10	Aprilia (2010)	Indikasi Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Rill	Independen: Right Issue Dependen: manipulasi aktivitas riil (manipulasi penjualan, overproduction, pengurangan biaya diskresioner)	1. Perusahaan di Indonesia terindikasi secara signifikan melakukan manajemen laba riil arus kas operasi saat right issue. 2. Perusahaan di Indonesia tidak terindikasi secara signifikan melakukan manajemen laba riil aktivitas produksi dan biaya diskresionari.

Sumber: Penelitian terdahulu yang diringkas, 2011

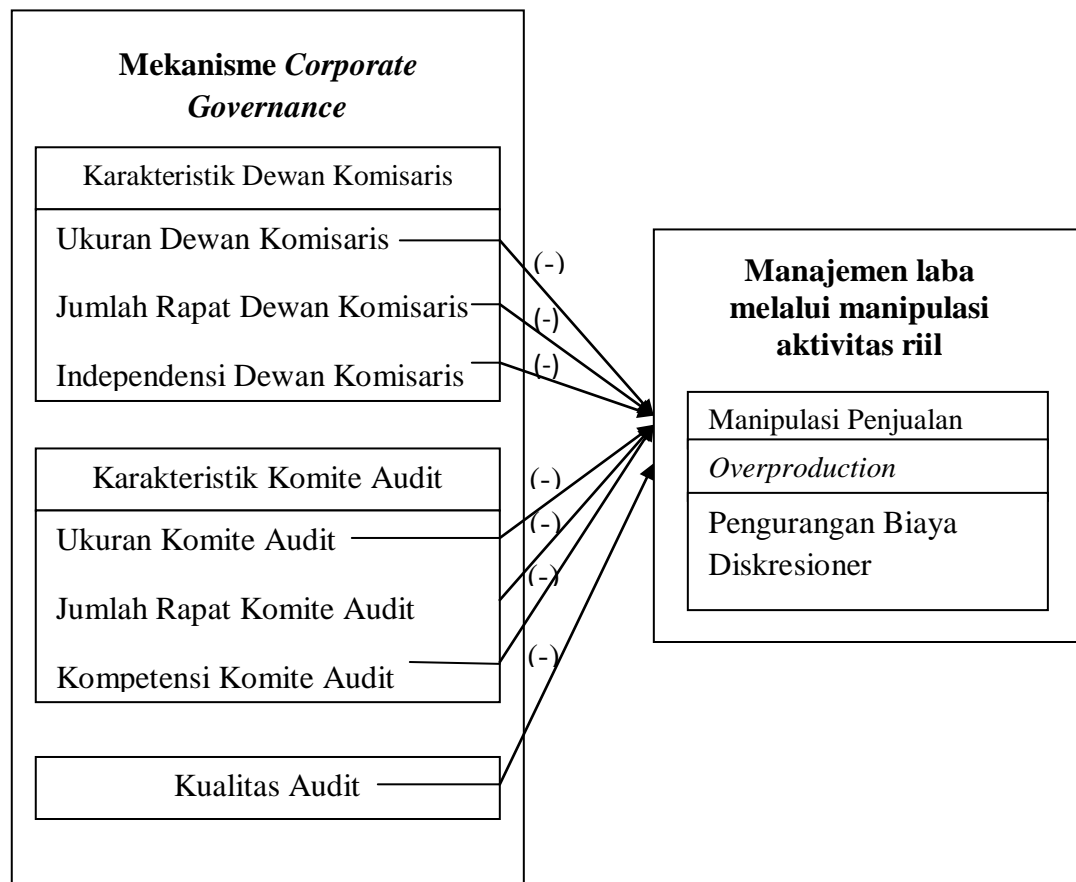
2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan mekanisme *corporate governance* melalui karakteristik

dewan komisaris, karakteristik komite audit serta kualitas audit perusahaan. Untuk karakteristik dewan komisaris dilihat dari ukuran, jumlah rapat, dan independensi dewan komisaris. Sedangkan karakteristik komite audit dilihat dari ukuran, jumlah rapat, dan kompetensi komite audit. Melalui penerapan mekanisme *corporate governance* tersebut diharapkan dapat meningkatkan proses monitoring sehingga dapat meminimalisir kesempatan manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil. Untuk menggambarkan pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba, maka dibuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran



Sumber : Dikembangkan untuk penelitian ini

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris dengan Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil

2.4.1.1 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peran dalam aktivitas pengawasan/monitoring perusahaan. Melalui peran pengawasan ini, perusahaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat terjamin kelangsungannya (Sulastini, 2007 dalam Waryanto, 2010). Menurut Vafeas (2000) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) bahwa peranan dewan komisaris dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh ukuran dewan komisaris.

Menurut Akhtaruddin (2009) dalam Waryanto (2010), semakin besar ukuran dewan komisaris maka komposisi pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh dewan komisaris semakin meningkat, sehingga akan tercipta aktivitas monitoring yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan praktik manajemen laba dapat dikurangi karena kesempatan manajer memainkan angka keuangan menjadi berkurang. Namun, beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan hasil yang masih beragam.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2010) menemukan bukti bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Berapa pun jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan tidak akan

mempengaruhi praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Pujiastuti (2010) bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap besarnya *working capital accrual* yaitu bahwa komposisi dewan komisaris akan mampu mengurangi praktik manajemen laba di perusahaan. Semakin besar ukuran dewan komisaris maka akan semakin bagus sistem monitoring yang tercipta didalam perusahaan sehingga diduga mampu meminimalisir terjadinya praktik manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1_a :Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.

2.4.1.2 Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, dewan komisaris mengadakan rapat-rapat rutin untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dewan direksi dan implementasinya (Waryanto, 2010). Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi antara anggota-anggota dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut akan membahas mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil oleh manajemen, serta mengatasi masalah benturan kepentingan (FCGI, 2002). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rapat dewan komisaris merupakan hal penting dalam menentukan efektivitas dewan komisaris dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Oleh karena itu, dengan semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, diharapkan mekanisme pengawasan dapat dilakukan semakin efektif. Pengawasan yang semakin efektif ini diharapkan akan mampu membatasi kesempatan manajer dalam memainkan angka-angka akuntansi sehingga praktik manajemen laba didalam perusahaan dapat diminimalisir. Hasil penelitian Chen dkk (2005) di China dalam Nuryaman (2008) menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan anggota dewan dalam satu tahun berpengaruh terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Jumlah rapat yang dilaksanakan oleh dewan komisaris diharapkan mampu berpengaruh terhadap praktik manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil. Dalam penelitiannya, Ratmono (2010) mengungkapkan bahwa pada perusahaan-perusahaan publik yang berkinerja buruk cenderung melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menaikkan labanya. Perusahaan-perusahaan tersebut cenderung melakukan manipulasi aktivitas riil untuk mencapai laba sedikit diatas nol. Dengan demikian seharusnya dewan komisaris lebih intensif melakukan rapat sebagai alat evaluasi dan monitoring kinerja perusahaan. Dengan adanya evaluasi kinerja dan pengawasan secara rutin diharapkan akan membuat manajer sulit melakukan manipulasi data keuangan sehingga praktik manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1_b = Jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.

2.4.1.3 Independensi Dewan Komisaris

Kao dan Chen (2004) dalam Nuryaman (2008) melakukan penelitian di Taiwan dan menemukan bukti bahwa komisaris eksternal lebih independen terhadap manajemen dibandingkan dengan komisaris internal, sehingga lebih efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap manajemen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris eksternal semakin berkurang manajemen laba yang terjadi. Penelitian yang dilakukan di India oleh Sarkar dkk (2006) dalam Nuryaman (2008) juga menemukan bahwa keberadaan dewan komisaris independen dapat membatasi manajemen laba, jika dewan komisaris tersebut memiliki kompetensi dan tidak sibuk.

Beberapa penelitian di Indonesia masih menunjukkan hasil yang beragam. Boediono (2005), Veronika dan Utama (2005), Ujiyantho (2007) menemukan bukti bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Namun, Andayani (2010) menemukan hasil yang berbeda bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Pengawasan komisaris independen yang efektif akan mengurangi masalah agensi yang timbul. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen akan menjadikan manajer atau agen berhati-hati dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga akan tercipta iklim yang lebih objektif sehingga mampu menyelaraskan perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen.

Sejalan dengan Andayani (2010), Petronila (2007) juga menemukan bukti bahwa keberadaan komisaris independen dapat menyeimbangkan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan perlindungan terhadap pemegang

saham minoritas dan *stakeholder*. Dengan demikian keberadaan komisaris independen diharapkan dapat mempengaruhi praktik manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil. Semakin meningkatnya independensi dewan komisaris maka semakin besar dapat mempengaruhi pengambilan keputusan guna menyalurkan berbagai benturan kepentingan sehingga praktik manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil semakin dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1_c = Independensi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.

2.4.2 Hubungan Karakteristik Komite Audit dengan Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil

2.4.2.1 Ukuran Komite Audit

Dalam rangka untuk menciptakan fungsi komite audit yang efektif dalam pengendalian dan pemantauan atas kegiatan pengelolaan perusahaan, komite harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab. Di Indonesia, pedoman pembentukan komite audit yang efektif (KNKG, 2002) menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Pierce dan Zahra (1992) dalam Anggarini (2010) menyatakan dalam teori ketergantungan sumber daya berargumen bahwa terciptanya fungsi pengawasan

komite audit yang efektif berhubungan dengan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh komite tersebut. Efektivitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite meningkat, karena komite memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Semakin besar ukuran komite audit maka perusahaan akan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengawasi kegiatan operasional perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, ukuran komite audit diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan sehingga dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{2a} = Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil

2.4.2.2 Jumlah Rapat Komite Audit

Efektivitas komite audit dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal memerlukan rapat secara rutin. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mewajibkan komite audit untuk mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun. Frekuensi pertemuan tersebut harus jelas terstruktur dan dikontrol dengan baik oleh ketua komite. Collier dan Gregory (1999) dalam Rahmat *et al.*, (2009) mengungkapkan bahwa komite audit yang mempunyai frekuensi pertemuan yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif. Menurut Anggarini (2010) dengan melakukan pertemuan secara periodik, komite audit dapat mencegah dan mengurangi

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan oleh manajemen. Hal ini dikarenakan aktivitas pengendalian internal perusahaan dilakukan secara terus menerus dan terstruktur sehingga setiap permasalahan dapat cepat terdeteksi dan diselesaikan dengan baik oleh manajemen.

Putri (2009) menemukan adanya hubungan signifikan antara jumlah pertemuan komite audit terhadap pengungkapan informasi laba perusahaan. Hal ini berarti semakin sering komite audit mengadakan pertemuan maka informasi laba suatu perusahaan juga akan semakin transparan. Dengan demikian semakin sering rapat yang diadakan maka fungsi pengawasan pun akan semakin efektif sehingga diharapkan dapat membatasi perilaku menyimpang yang dilakukan manajemen dan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil pun dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{2b} = Jumlah rapat Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.

2.4.2.3 Kompetensi Komite Audit

Pengetahuan dibidang akuntansi dan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. Latar belakang pendidikan menjadi ciri penting untuk memastikan komite audit melaksanakan peran mereka secara efektif. Anggota komite audit yang menguasai akuntansi dan keuangan akan lebih profesional dan cepat

beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi (Hambrick dan Mason, 1984 dalam Rahmat *et al.*, 2009).

Menurut Dezoort *et al.* (2002) dalam Anggarini (2010) kompetensi komite audit akan meningkatkan jumlah salah saji material yang ditemukan sehingga dapat dikomunikasikan dan dikoreksi secepatnya. Komite audit dengan anggota yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi lebih efektif. Keberadaan personal yang memenuhi syarat sebagai anggota komite audit diharapkan dapat mengadopsi standar akuntansi dengan tingkat prestasi yang tinggi, dapat menyediakan bantuan dalam peran pengawasan, dan berusaha keras untuk citra dan kinerja perusahaan yang lebih baik (Anggarini, 2010).

Karena memiliki pengetahuan dibidang akuntansi dan keuangan, komite audit yang berkompeten akan mampu mendeteksi kesalahan dan mengoreksi secara cepat. Dalam kaitannya dengan praktik manajemen laba, komite audit yang berkompeten mampu memeriksa dan menganalisis informasi keuangan sehingga mampu mendeteksi adanya indikasi praktik manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil. Dengan demikian komite audit dengan kompetensi yang baik mampu meningkatkan kualitas pengawasan sehingga praktik manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil yang dilakukan manajemen dapat diminimalisir.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{2c} = Kompetensi Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.

2.4.3 Hubungan Kualitas Audit dengan Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil.

Peran eksternal auditor yaitu memberikan penilaian secara independen dan profesional atas keandalan dan kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Menurut Herawaty (2008), kualitas audit yang dilihat dari peran auditor yang memiliki kompetensi memadai dan mempunyai sikap independen mampu menjadi pihak yang dapat memberikan kepastian terhadap integritas angka-angka akuntansi yang dilaporkan oleh manajemen. Auditor eksternal dapat menjadi mekanisme pengendalian terhadap manajemen agar manajemen menyajikan informasi keuangan secara andal dan terbebas dari praktik kecurangan akuntansi. Peran ini dapat dicapai jika auditor eksternal memberikan jasa audit yang berkualitas (Nuryaman, 2008).

Penelitian Dang et al., (2004) dalam Mirna dan Indira (2007) berpendapat bahwa auditor spesialis industri berhubungan dengan kualitas audit diukur dengan kepatuhan auditor terhadap GAAP. KAP yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama, akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang resiko audit khusus dalam industri tersebut. Pemahaman yang lebih atas suatu industri akan meningkatkan salah saji material yang ditemukan. Auditor spesialis diharapkan mampu mendeteksi kesalahan dalam pelaporan keuangan dan kemungkinan adanya manipulasi data keuangan. Dengan diaudit oleh KAP spesialis industri maka diharapkan bahwa KAP spesialisasi industri mampu membatasi manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil yang dilakukan perusahaan. Dengan kata lain KAP yang berkualitas dalam industri tertentu

diharapkan mampu membatasi praktik manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 = Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah apapun yang membedakan atau membawa variasi pada nilai. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel penelitian dan definisi operasional variabel dapat dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
X	JDK	<i>Annual Report</i>	Jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan	Nominal
	JRDK	<i>Annual Report</i>	Jumlah rapat internal dewan komisaris dalam satu tahun	Nominal
	IDK	<i>Annual Report</i>	Persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris	Rasio
	JKA	<i>Annual Report</i>	Jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan	Nominal
	JRKA	<i>Annual Report</i>	Jumlah rapat komite audit dalam satu tahun	Nominal
	KKA	<i>Annual Report</i>	Jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan	Nominal
	KA	Laporan Keuangan	Kode 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP spesialis industri (memiliki jumlah klien paling banyak dalam suatu industri) dan kode 0 untuk lainnya (Balsam, 2003)	Nominal
Y	Manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil	Laporan Keuangan	Diukur dengan model pengukuran <i>Abn_CFO</i> , <i>Abn_DISEXP</i> , dan <i>Abn_PROD</i> (Roychowdhury, 2006)	Nominal

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, variabel penelitian dan definisi operasional variabel dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau disebut variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.

Manajemen laba pada penelitian ini diukur dengan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil yang menggunakan model pengukuran yang dikembangkan oleh Roychowdhury (2006); Ratmono (2010). Proksi-proksi manajemen laba melalui pendekatan ini yaitu *abnormal CFO*, *abnormal discretionary expenses*, dan *abnormal production cost* yang masing-masing dihitung sebagai berikut:

a. *Abnormal Cash Flow Operations (Abn_CFO)*

$$CFO_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1(1/A_{t-1}) + \alpha_2(S_t/A_{t-1}) + \alpha_3(\Delta S_t/A_{t-1}) + \varepsilon_t \quad (3.1)$$

b. *Abnormal Discretionary Expenses (Abn_DISEXP)*

$$DISEXP_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1(1/A_{t-1}) + \alpha_2(S_{t-1}/A_{t-1}) + \varepsilon_t \quad (3.2)$$

c. *Abnormal Production Costs (Abn_PROD)*

$$PROD_t/A_{t-1} = \alpha_0 + \alpha_1(1/A_{t-1}) + \alpha_2(S_t/A_{t-1}) + \alpha_3(\Delta S_t/A_{t-1}) + \alpha_4(\Delta S_{t-1}/A_{t-1}) + \varepsilon_t \quad (3.3)$$

Keterangan:

CFO_t = arus kas operasi perusahaan i pada tahun t

$DISEXP_t$ = *discretionary expenses* yaitu beban penelitian dan pengembangan + beban iklan + beban penjualan, administrasi dan umum.

$PROD_t$ = *production costs* yaitu harga pokok penjualan + perubahan persediaan

A_{t-1} = aset total perusahaan i pada tahun t-1

S_t = penjualan total perusahaan i pada tahun t-1

ΔS_t = perubahan penjualan perusahaan dari akhir tahun t dengan tahun t-1

ΔS_{t-1} = perubahan penjualan perusahaan dari akhir tahun t-1 dengan tahun t-2

Pada umumnya perusahaan-perusahaan di Indonesia, mengklasifikasikan biaya iklan serta biaya penelitian dan pengembangan kedalam biaya penjualan, umum dan administrasi yang dinyatakan sebagai beban usaha. Model (1), (2) dan (3) akan diestimasi setiap tahun. Residual dari hasil estimasi (1) merupakan *abnormal CFO* perusahaan i pada tahun t, residual dari hasil estimasi (2) merupakan *abnormal discretionary expenses* perusahaan i pada tahun t sedangkan residual dari hasil estimasi (3) merupakan *abnormal production costs* perusahaan i pada tahun t.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen atau disebut juga variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen (terikat). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari karakteristik Dewan Komisaris, karakteristik Komite Audit dan kualitas audit.

3.1.2.1 Karakteristik Dewan Komisaris

a. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris dihitung dengan menggunakan indikator jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan yang disebutkan pada laporan tahunan yang tercantum dalam laporan *corporate governance*.

b. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat Dewan Komisaris merupakan jumlah pertemuan atau rapat internal yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam waktu satu tahun. Jumlah rapat Dewan Komisaris ini diukur dengan melihat jumlah rapat yang dilakukan Dewan Komisaris pada laporan tahunan perusahaan yang tercantum dalam laporan *corporate governance*.

c. Independensi Dewan Komisaris

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Independensi Dewan Komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proporsi Komisaris Independen dalam suatu Dewan Komisaris perusahaan. Independensi Dewan Komisaris diukur dengan rasio (%) antara jumlah anggota Komisaris Independen dibandingkan dengan jumlah total anggota Dewan Komisaris.

3.1.2.2 Karakteristik Komite Audit

a. Ukuran Komite Audit

Berdasarkan Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 menyatakan bahwa komite audit pada perusahaan publik Indonesia terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota dan diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen. Ukuran Komite Audit diukur dengan cara menghitung jumlah anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan.

b. Jumlah Rapat Komite Audit

Jumlah rapat Komite Audit merupakan jumlah pertemuan yang dilakukan oleh anggota Komite Audit dalam waktu satu tahun. Berdasarkan pedoman FCGI (2002) menyatakan bahwa komite audit harus mengadakan pertemuan paling sedikit setiap tiga bulan atau minimal empat kali pertemuan dalam satu tahun. Jumlah rapat Komite Audit ini diukur dengan menghitung jumlah rapat yang dilaksanakan Komite Audit pada laporan tahunan perusahaan yang tercantum dalam laporan *corporate governance* maupun laporan Komite Audit.

c. Kompetensi Komite Audit

Kompetensi Komite Audit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah latar belakang pendidikan anggota Komite Audit. Pengukuran latar belakang pendidikan berdasarkan Keputusan Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 yang menyebutkan bahwa minimal salah seorang dari anggota komite audit adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi

atau keuangan. Latar belakang pendidikan dapat berasal dari lulusan fakultas ekonomi bergelar sarjana muda, sarjana, magister, dan doktor dari Universitas dalam negeri maupun luar negeri atau pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan non-formal yang berkaitan dengan kompetensi keuangan dan administrasi bisnis. Kompetensi ini harus dimiliki oleh anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Variabel ini diukur dengan cara menghitung jumlah anggota Komite Audit yang mempunyai latar belakang dan keahlian dalam bidang akuntansi dan atau keuangan.

3.1.2.3 Kualitas Audit

Kualitas Audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas auditor eksternal perusahaan. Proksi yang digunakan untuk mengukur kualitas audit pada penelitian ini adalah spesialisasi industri KAP yang menggambarkan keahlian dan pengalaman audit seorang auditor pada bidang industri tertentu. Auditor spesialisasi industri memiliki pengetahuan yang spesifik dan mendalam serta berpengalaman dalam suatu bidang industri tertentu (Almutari, 2007 dalam Ningsaptiti, 2010).

Auditor spesialis industri diyakini mampu mendeteksi kesalahan-kesalahan secara lebih baik, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan penilaian tentang integritas angka-angka didalam laporan keuangan. Pengukuran variabel ini menggunakan *variabel dummy*, nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh auditor spesialis, dan 0 jika lainnya. Auditor digolongkan spesialis jika dalam suatu industri memiliki jumlah klien terbesar dibandingkan yang lainnya (Balsam *et al.*,

2003). Dalam penelitian ini penggolongan industri mengacu pada penggolongan yang terdapat pada *IDX Fact Book* dimana perusahaan publik non keuangan digolongkan menjadi 8 kategori industri yaitu: *Agriculture; Mining; Basic Industry and Chemicals; Miscellaneous Industry; Consumer Goods Industry; Property, Real Estate and Building Construction; Infrastructure, Utilities and Transportation; Trade, Services and Investment.*

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan dilakukan dari tahun 2008-2009 agar lebih mencerminkan kondisi saat ini. Penentuan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2008-2009. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam industri keuangan dan perbankan dikeluarkan dari sampel karena mempunyai karakteristik aset yang sangat berbeda dengan industri lain.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang dinyatakan dalam rupiah dan berakhir pada tanggal 31 Desember selama periode pengamatan tahun 2008-2009.
3. Memiliki ketersediaan data yang lengkap, baik data mengenai *corporate governance* perusahaan maupun data yang diperlukan untuk mendeteksi manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.

4. Untuk menganalisis manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil, *test sample* yang akan digunakan adalah seluruh perusahaan yang memenuhi kriteria-kriteria di atas dan mempunyai kinerja keuangan tidak terlalu baik (diukur dengan nilai laba bersih/total aset 0-0,005), sedangkan yang menjadi *control sample* adalah seluruh perusahaan yang menjadi sisa sampel (*rest of the sample*). Pemilihan *suspect firms* ini mengikuti prosedur yang dilakukan Roychowdhury (2006).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan publik yang terdaftar di BEI yang dipublikasikan pada tahun 2008-2009. Data tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)*, dan *IDX Fact Book*.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu data diperoleh dari beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, penelusuran data ini dilakukan dengan cara:

1. Penelusuran secara manual untuk data dalam format kertas hasil cetakan.

Data yang disajikan dalam format kertas hasil cetakan antara lain berupa jurnal, buku, skripsi dan tesis.

2. Penelusuran dengan menggunakan komputer untuk data dalam format elektronik. Data yang disajikan dalam format elektronik ini antara lain berupa katalog perpustakaan, laporan-laporan BEI, dan situs internet.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Estimasi Model Manajemen Laba Melalui Manipulasi Aktivitas Riil

Sebelum menganalisis model regresi berganda untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu memastikan model estimasi pada ketiga aktivitas riil cukup baik. Hal ini dimaksudkan mengukur ketepatan model yang digunakan untuk mengukur proksi-proksi manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil.

3.5.2 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2006). Standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum menunjukkan hasil analisis terhadap dispersi data.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda adalah terpenuhinya uji asumsi klasik. Empat uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi asumsi normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Penjelasan masing-masing pengujian asumsi klasik akan diuraikan seperti di bawah ini.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Cara untuk menguji normalitas adalah dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk menentukan normalitas distribusi *residual*. Jika *sig* atau *p-value* $> 0,05$, maka data berdistribusi normal.

3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari *residual* antara satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang dapat digunakan untuk menguji adanya gejala ini adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika tidak membentuk pola tertentu atau titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.5.3.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya korelasi pada tempat yang berdekatan dan menimbulkan konsekuensi, yaitu interval keyakinan menjadi lebar serta varians dan kesalahan standar akan ditaksir terlalu rendah. Jika kesalahan pengganggu dalam observasi saling berkorelasi satu sama lain atau terjadi saling ketergantungan, maka akan terjadi autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$. Jika

terjadi korelasi, maka terdapat masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat autokorelasi. Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson.

3.5.3.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Jika terdapat korelasi, berarti terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah dengan VIF (*variance inflation factor*). Indikasi adanya multikolinearitas adalah apabila nilai VIF > 10.

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan antara penerapan mekanisme *corporate governance* dengan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil mengacu pada model yang dikembangkan oleh Roychowdhury (2006); Ratmono (2010) melalui persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Y_t = & \beta_0 + \beta_1 \text{Suspect_NI}_t + \beta_2 \text{JDK} + \beta_3 \text{JRDK} + \beta_4 \text{IDK} + \beta_5 \text{JKA} + \beta_6 \text{JRKA} + \beta_7 \\
 & \text{KKA} + \beta_8 \text{KA} + \beta_9 \text{Suspect_NI}_t * \text{JDK} + \beta_{10} \text{Suspect_NI}_t * \text{JRDK} + \beta_{11} \\
 & \text{Suspect_NI}_t * \text{IDK} + \beta_{12} \text{Suspect_NI}_t * \text{JKA} + \beta_{13} \text{Suspect_NI}_t * \text{JRKA} \\
 & + \beta_{14} \text{Suspect_NI}_t * \text{KKA} + \beta_{15} \text{Suspect_NI}_t * \text{KA} + \varepsilon_t \quad (3.4)
 \end{aligned}$$

Keterangan :

Y_t = Proksi-proksi manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil yaitu masing-masing *abnormal cash flow operations* (Abn_CFO), *abnormal discretionary expenses* (Abn_DISEXP) , dan *abnormal production cost* (Abn_PROD).

Suspect_NI_t = Variabel indikator yaitu dengan nilai 1 untuk perusahaan *suspect* yaitu yang memenuhi kondisi $0 \leq ROA \leq 0.005$ (diasumsikan mempunyai motivasi melakukan manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil karena kinerjanya yang buruk) dan diberi nilai 0 untuk yang lain (Roychowdhury, 2006).

JDK = Jumlah Dewan Komisaris

JRDK = Jumlah Rapat Dewan Komisaris

IDK = Idependensi Dewan Komisaris

JKA = Jumlah Komite Audit

JRKA = Jumlah Rapat Komite Audit

KKA = Kompetensi Komite Audit

KA = Kualitas Audit

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengujian statistik parametrik.

Uji regresi merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik, untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan dilakukan uji pengaruh simultan (F test), uji koefisien determinasi (R^2), dan uji pengaruh parsial (t test).

3.5.3.1 Uji Pengaruh Simultan (F test)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *sigificance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima, yang berarti koefisien regresi signifikan, artinya terdapat pengaruh secara bersama-sama yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak, yang berarti koefisien regresi tidak signifikan, artinya seluruh variabel independen dalam model tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua variasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, tapi karena R^2 mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang

dimasukkan kedalam model, maka penelitian ini menggunakan *adjusted R²* berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted R²* semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Parsial (t Test)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian mendasarkan pada prosedur yang digunakan Roychowdhury (2006) dan Ratmono (2010) dengan memfokuskan pada koefisien interaksi antara variabel *Suspect_NI* dengan tujuh variabel independen penelitian (JDK, JRDK, IDK, JKA, JRKA, KKA, dan KA). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Pengambilan keputusan mendasarkan pada prosedur yang digunakan Ratmono (2010) bahwa mekanisme *corporate governance* mampu mengurangi manajemen laba melalui manipulasi aktivitas riil yang dilakukan perusahaan jika mampu mempengaruhi paling tidak salah satu dari tiga indikator manajemen laba tersebut.

a. Manipulasi Aktivitas Riil melalui Arus Kas Kegiatan Operasi

Untuk $Y_t = abnormal\ CFO$, perusahaan diduga melakukan manipulasi aktivitas riil melalui arus kas kegiatan operasi apabila rerata arus kas kegiatan operasi *abnormal* berada di bawah 0 (bernilai negatif). Jika hasil menunjukkan koefisien $\beta_9, \beta_{10}, \beta_{11}, \beta_{12}, \beta_{13}, \beta_{14}, \beta_{15}$ bernilai positif dan signifikan maka $H1_a, H1_b, H1_c, H2_a, H2_b, H2_c, H3$ didukung atau dengan kata lain proksi-proksi mekanisme *corporate governance* dapat menahan tindakan manipulasi penjualan yang dilakukan perusahaan-perusahaan

suspect dan begitu juga sebaliknya jika tetap bernilai negatif signifikan maka variabel-variabel mekanisme *corporate governance* tidak dapat menahan tindakan manipulasi penjualan yang dilakukan perusahaan-perusahaan *suspect* sehingga perusahaan-perusahaan yang *suspect* tetap mempunyai *abnormal* CFO yang lebih rendah dibandingkan perusahaan-perusahaan lain.

b. Manipulasi Aktivitas Riil melalui Biaya Diskresioner

Untuk $Y_t = \text{abnormal discretionary expenses}$, perusahaan diduga melakukan manipulasi aktivitas riil melalui pengurangan biaya-biaya diskresioner apabila rerata biaya diskresioner *abnormal* bernilai negatif. Jika hasil regresi menunjukkan koefisien $\beta_9, \beta_{10}, \beta_{11}, \beta_{12}, \beta_{13}, \beta_{14}, \beta_{15}$ bernilai positif dan signifikan maka $H1_a, H1_b, H1_c, H2_a, H2_b, H2_c, H3$ didukung atau dengan kata lain proksi-proksi mekanisme *corporate governance* dapat menahan tindakan manipulasi pengurangan pengeluaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan *suspect* dan begitu juga sebaliknya jika tetap bernilai negatif signifikan maka variabel-variabel mekanisme *corporate governance* tidak dapat menahan tindakan manipulasi pengurangan pengeluaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan *suspect* sehingga perusahaan-perusahaan yang *suspect* tersebut tetap mempunyai *abnormal discretionary expenses* yang lebih rendah dibandingkan perusahaan-perusahaan lain.

c. Manipulasi Aktivitas Rill melalui Biaya Produksi

Untuk $Y_t = \textit{abnormal PROD}$, perusahaan diduga melakukan manipulasi aktivitas riil melalui produksi yang berlebihan (*overproduction*) apabila rerata biaya produksi *abnormal* bernilai positif. Jika hasil regresi menunjukkan koefisien $\beta_9, \beta_{10}, \beta_{11}, \beta_{12}, \beta_{13}, \beta_{14}, \beta_{15}$ bernilai negatif dan signifikan maka $H1_a, H1_b, H1_c, H2_a, H2_b, H2_c, H3$ didukung atau dengan kata lain proksi-proksi mekanisme *corporate governance* dapat menahan tindakan manipulasi produksi yang berlebihan yang dilakukan perusahaan-perusahaan *suspect* dan begitu juga sebaliknya jika tetap bernilai positif signifikan maka variabel-variabel mekanisme *corporate governance* tidak dapat menahan tindakan manipulasi produksi yang berlebihan yang dilakukan perusahaan-perusahaan *suspect* sehingga perusahaan-perusahaan yang *suspect* tersebut tetap mempunyai *abnormal production cost* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan lain.